



**Judul** : Masyarakat Terus Kawal Putusan MK  
**Tanggal** : Jumat, 23 Agustus 2024  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 1&15

## **PILKADA 2024**

# **Masyarakat Terus Kawal Putusan MK**

**JAKARTA, KOMPAS** — Berbagai elemen masyarakat akan tetap mengawal putusan Mahkamah Konstitusi dan pembatalan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Gelombang aksi masyarakat bukan tidak mungkin kembali terjadi jika pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk mematuhi putusan MK dalam Pilkada 2024 tidak dilaksanakan.

Pada Kamis (22/8/2024), unjuk rasa terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air. Unjuk rasa yang dilakukan berbagai elemen masyarakat itu untuk menuntut DPR mematuhi

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah dan titik penghitungan batas usia minimum calon kepala daerah. Mereka juga mendesak DPR menghentikan pengesahan RUU Pilkada yang dinilai tidak sesuai dengan norma yang telah diputuskan oleh MK.

Selain di sekitar Kompleks Parlemen, Jakarta, unjuk rasa, antara lain, juga terjadi di depan Gedung DPRD Jawa Tengah di Semarang; Titik Nol Kilometer

**(Bersambung ke hlm 15 kol 1-3)**

## Masyarakat Terus Kawal Putusan MK

(Sambungan dari halaman 1)

Yogyakarta, Yogyakarta; Gedung DPRD Jawa Barat di Bandung; Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur; dan Kantor DPRD Kota Malang, Jatim.

Unjuk rasa serupa juga digelar di depan Kantor DPRD Sulawesi Tenggara di Kendari; Balai Kota Surakarta di Jateng; Kampus Universitas Mulawarman di Samarinda, Kalimantan Timur; DPRD Sumatera Barat di Padang; dan DPRD Sulawesi Selatan di Makassar.

Di Jakarta, tidak lama setelah pernyataan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menyebutkan RUU Pilkada batal disahkan dan pendaftaran Pilkada 2024 mengikuti putusan MK, pengunjuk rasa di depan Gedung DPR mulai beranjak membubarkan diri sekitar pukul 19.30 WIB. Polisi menyisir sepanjang Jalan Gatot Subroto untuk memastikan massa membubarkan diri.

Mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fernando Adi Saputro, tak menampik pengunjuk rasa senang dengan dibatalkannya RUU Pilkada. Namun, mahasiswa akan tetap mengawal proses tersebut hingga selesai.

"Kami perlu kawal putusan MK ini. Kami tidak tahu, kan, putusan MK ini mau diakali DPR entah kapan, entah malam ini atau tengah malam. Meski DPR tak mungkin menggelar rapat paripurna lagi, kami mahasiswa tetap mengawal," tutur Fernando.

Fernando khawatir upaya pembahasan RUU Pilkada yang tidak sesuai dengan pu-

utusan MK tersebut dapat dilanjutkan kembali pada waktu lain. "Hanya ada satu kata, lawan," ujarnya.

### Aksi di daerah

Di Yogyakarta, sekitar 2.000 orang yang terdiri dari mahasiswa, akademisi, seniman, dan elemen masyarakat sipil lainnya juga turun ke jalan. Massa berkumpul di kantong parkir Jalan Abu Bakar Ali di ujung utara Jalan Malioboro sejak Kamis pagi.

Mahasiswa dari sejumlah kampus itu sempat berorasi di depan Gedung DPRD DIY dan Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta. Setelah itu, unjuk rasa dipusatkan di Titik Nol Kilometer Yogyakarta.

"Tuntutan kami meminta pemerintah dan DPR menghargai putusan MK dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) mengubah peraturan KPU agar sesuai dengan putusan MK," kata Reformati, salah satu koordinator mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM).

Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Fathul Wahid ikut dalam unjuk rasa tersebut. Ada sekitar 100 dosen UII yang juga turun ke jalan. "Aksi ini menyuarakan suara jernih dari Yogyakarta untuk mengingatkan penguasa yang tampaknya dalam beberapa bulan terakhir sudah kelewatan," katanya.

Sementara itu, Herlambang Wiratraman, dosen Fakultas Hukum UGM, yang juga ikut berunjuk rasa, menyebut aksi ini sebagai bentuk kemauan publik yang seakan dibodohi terus-menerus oleh elite.

Seniman Butet Kartaredja-sa juga hadir menyuarakan si-

kapnya. "Kita tidak bisa diam ketika konstitusi dirusak, demokrasi dirusak, hukum diporak-porandakan. Jadi, jelas yang dilakukan DPR kemarin itu bagi saya adalah kejahatan yang terang benderang," ucap Butet.

Di depan Gedung DPRD Jateng, unjuk rasa mahasiswa dan aliansi masyarakat sipil diwarnai keriuhan saat mereka berupaya masuk ke dalam kawasan kantor DPRD. Gerbang DPRD dijebol massa. Saat ada pengunjuk rasa berorasi, ada peserta lain yang ditangkap aparat.

Sebagian pengunjuk rasa marah dan menuntut teman mereka dibebaskan. Massa kemudian berupaya merangsek ke dalam. Polisi kemudian menembakkan gas air mata. Akibatnya, 18 orang terluka. Sebanyak 15 orang dirawat di RS Roemani, 1 orang di RS Pandanaran, 1 orang di RS Kariadi, dan 1 orang di RS Tlogorejo.

Sementara itu, di depan Gedung DPRD Jabar, Indra Sulisty, perwakilan dari Koalisi Rakyat Gugat Negara, mengatakan, revisi UU Pilkada dinilai sebagai upaya menguntungkan elite dan keluarga penguasa. "Perbuatan mereka akan menjadi preseden buruk untuk masa depan negara," ujarnya.

Di Samarinda, selain menyoroti soal RUU Pilkada, mahasiswa Universitas Mulawarman juga menyuarakan soal proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut mereka, Teluk Balikpapan, jalur logistik pembangunan IKN, mengancam lingkungan di area teluk.

(JAL./HRS/FLO/BRO/ENG/  
JOL/ESA/VIO/NCA/XTI/DIA/  
CIP/REN/RAM/TKI/WIL)